

KAPITALISASI DEMOKRASI DAN JARINGAN PATRONASE POLITIK (KETERLIBATAN PENGUSAHA TAMBANG DALAM PILKADA DI KALIMANTAN SELATAN)

M. Uhaib As'ad

FISIP, Universitas Islam Kalimantan MAB (UNISKA) Banjarmasin

Email: uhaibm@yahoo.com

Abstract

This paper explain the conspiracy and involvement boss mine (coal) in several provincial elections (regents and governors) in South Kalimantan. As is known, the political landscape of post Soeharto New Order government that gave birth to democracy and radical change in the institutions of power, namely from the centralized power-authoritarian system to a democratic system of government has spawned a democratic transition prolonged until today. In the midst of a prolonged transition to democracy at this time, the arena of democracy has been hijacked and the stage of political and economic power has been controlled by entrepreneurs or local and national capitalist power by doing pesekongkolan between candidates authorities or local authorities that one of them through the local election process. The businessmen are involved as a supplier of funds to the local authorities candidat candidate to win as a form of money politics and transactional politics. In some cases the local elections in South Kalimantan, such as the election of the regent and the governor, political practice as it was very clear and has already become a political culture that is structured and massive post-New Order government.

Keywords: *capitalisation democracy, election, mine bosses, political clientelism*

PENDAHULUAN

Sejak berakhirnya panggung kekuasaan Orde Baru dan bangkitnya Orde Reformasi telah melahirkan transisi demokrasi politik dari kekuasaan otoriter ke kekuasaan demokratis. Transisi demokrasi politik yang diiringi perubahan pada institusi-institusi kekuasaan dan lembaga-lembaga demokrasi telah memberikan ruang politik lebih terbuka bagi warga dalam mengaktualisasikan kepentingan politik secara rasional. Seperti diketahui, di era kekuasaan Orde Baru ruang demokrasi bagi warga sangat terbatas karena kuatnya kontrol dari negara yang merampas hak-hak politik warga untuk mengekspresikan aspirasi politik secara terbuka di tengah sistem kekuasaan otoriter. Pilihan politik yang serba terbatas bagi warga telah melahirkan kebuisan politik (*political silent*), pembangkangan (*disobidience*) dan loyalitas semu terhadap kekuasaan oligarki yang mendistorsikan nilai-nilai demokrasi selama Orde Baru berkuasa.

Praktik kekuasaan oligarki Orde Baru tidak saja mewarnai struktur politik tetapi juga pada struktur ekonomi yang didominasi oleh elite-elite Orde dan kroni bisnis (*business-client*) Suharto. Menurut Yahya Muhaimin, para pengusaha yang dibesarkan di dalam lingkaran Suharto menjadi patronase ekonomi dan politik (*patron-client*) yang mendapat fasilitas kebijakan, proteksi, lisensi, dan monopoli. Para elite Orde Baru atau orang-orang yang ada dalam lingkaran birokrasi (*inner circle bureaucracy*) saling mempertukarkan sumber daya masing-masing (*exchange resources*) yang saling menguntungkan (Muhaimin, 1991). Institusi kekuasaan dan regulasi dijadikan arena persekongkolan antara penguasa dan pengusaha dan berlindung dibalik institusi-institusi negara atau lembaga-lembaga demokrasi seperti partai politik.

Pola struktur birokrasi paternalistik ini, Karl D. Jackson menyebut sebagai *bureaucratic polity* yang memberikan struktur kesempatan bagi kelompok oligarki atau para predator ekonomi untuk mengakumulasi sumber daya

ekonomi negara secara monopolistik (Jackson, 1978). Argumentasi teoritik Jackson tersebut, bahwa negara Orde Baru dalam konsepsi *bureaucratic polity* telah menjadikan aparat birokrasi memiliki peran dalam mengelolah kebijakan-kebijakan ekonomi. Pada sisi lain, para pengusaha dalam menjalankan aktivitas bisnis tampil sebagai pemburu rente (*rent-seekers*) melalui jaringan bisnis politik, pesekongkolan dan monopolistik. Perilaku pengusaha seperti ini oleh Yoshihara Kunio digambarkan sebagai kapitalis semu (*ersatz capitalism*), yaitu kelompok pengusaha yang lahir karena mendapatkan fasilitas dan proteksi dari negara (Kunio, 1988).

Menurut Edward Aspinall dan Greg Fealy, bahwa kekuasaan politik Orde Baru telah mewariskan pemerintahan otoritarian birokratik yang berdampak lahirnya perilaku oligarki predator dan mengakar secara terstruktur dalam realitas ekonomi dan politik sampai ke tingkat lokal (Aspinall, 2003). Struktur ekonomi dan kekuasaan politik yang dikuasai oleh para oligarki, beberapa daerah mengalami ketimpangan pembangunan sosial-ekonomi, ketidakadilan, keterbelakangan infrastruktur pembangunan, resistensi serta konflik di sejumlah daerah akibat rasa ketidakadilan selama pemerintahan Orde Baru. Di sejumlah daerah yang memiliki potensi sumber daya alam tidak memberikan dampak secara sosial dan ekonomi bagi daerah, karena sistem pengelolaan sumber daya alam lebih banyak dikendalikan oleh pusat dari pada daerah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas sebagai jastifikasi teoritik bahwa: Pemerintahan pasca Orde baru, dinamika politik lokal semakin menguat yang diiringi munculnya orang-orang kuat daerah (*local strongmen*) atau bos-bos lokal (*local bossism*) yang berlatar belakang pengusaha yang menguasai panggung politik. Sebagai kelompok yang memiliki kuasa ekonomi yang menguasai panggung politik lokal telah membajak demokrasi melalui kuasa uang, muncul sebagai oligarki dan patronase baru daerah (*the new emerging of local oligarchy and patronage*). Di era demokratisasi yang diiringi kebijakan desentralisasi dan Pilkada langsung telah melahirkan sisi gelap demokrasi (*the dark side of democracy*).

Merujuk pada pemikiran Hadiz (2010) bahwa perubahan institusi kekuasaan namun tidak diiringi oleh perubahan perilaku para aktor politik, para aktor politik masih berperilaku oligarki predatoris yang berlatar belakang pengusaha. Era demokratisasi tidak serta merta diiringi tumbangnyanya kekuatan oligarki predatoris, justru terdesentralisasi ke daerah. Era demokratisasi yang melahirkan perubahan institusi kekuasaan sebagai upaya mengakhiri kekuasaan oligarki dan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui hadirnya kelembagaan baru (*new institutionalism*), tetapi justru dimanfaatkan kembali oleh aktor lokal menguasai institusi demokrasi (lembaga legislatif dan partai politik)

Selanjutnya Hadiz dalam *Localising Power in Post Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective* menggambarkan bahwa pasca kejatuhan Orde Baru, kekuatan oligarki sebagai sekutu Soeharto telah berhasil mengamankan diri dalam pemerintahan dan menguasai struktur ekonomi dan kekuasaan politik. Robison dan Hadiz semakin memperjelas bahwa ada tidaknya perubahan demokratisasi ekonomi dan politik pasca kejatuhan kekuasaan politik Orde Baru ditentukan oleh ada tidaknya keruntuhan di dalam *the social interests and relations of power in wich they were embedded*.

Menurut Robison dan Hadiz dalam Marijan mengatakan "*the conglomeraters and the big politico-business families of the Soeharto era proved less vulnerable than their predecessors*". Bertahannya perilaku oligarki pasca kekuasaan politik Orde Baru akar persoalannya terletak pada kerangka institusi kekuasaan. Perubahan institusi kekuasaan tanpa diiringi perubahan fundamental dalam struktur relasi kekuasaan dan perilaku politik para aktor, sementara institusi kekuasaan telah dikuasai para kelompok oligarki.

Dalam Aspinall dan As'ad (2013) mengenai *Local Election: Mining and Local Bossism in South Kalimantan and Central Kalimantan*, memperlihatkan sejumlah fakta tentang keterlibatan sejumlah pengusaha tambang batubara menjadi *political broker* dalam pilkada di sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Tengah. Keterlibatan sejumlah pengusaha tambang menjadi *political*

broker dalam pilkada dengan harapan akan memperoleh balas jasa politik dari penguasa yang terpilih dalam pilkada, khususnya terkait dengan pengelolaan sumber ekonomi daerah atau proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, pasca pilkada berbagai kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang terpilih maka kebijakan itu akan berpihak kepada kepentingan patronase politik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dalam desain penelitian kualitatif. Desain ini dipilih mengingat penelitian bertujuan untuk mengungkapkan apa yang terjadi dalam kenyataan empirik. Penelitian ini lebih banyak mengobservasi dan mengeksplorasi perilaku objek yang diteliti, sehingga memungkinkan untuk ditarik hubungan sebab akibat dari penelitian ini.

Realitas yang diamati bervariasi dan banyak fakta yang tidak mungkin diungkapkan melalui observasi seperti latar belakang perilaku objek, bagaimana menjalankan kebijakan, dan bagaimana interaksi elite politik dengan instansi birokrasi pemerintah, komparador lokal (pengusaha tambang), politisi atau elite partai politik, serta dengan masyarakat. Dengan demikian, akan terungkap dari observasi dan interaksi antara peneliti dengan objek untuk memperoleh penafsiran emik, yaitu deskripsi yang didasarkan pada persepsi informan terhadap suatu fenomena yang sedang diteliti.

Penelitian ini tidak untuk digeneralisasi, namun untuk menguraikan fakta dan realitas secara rinci (*thick description*) dan tidak bertujuan menguji atau menguatkan teori tertentu, namun secara induktif akan mengeksplorasi data empirik untuk menarik kesimpulan, sehingga penelitian ini memenuhi syarat sebagai penelitian kualitatif (Merriam, 1998:18).

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, yaitu suatu pendekatan *sosiologi fenomenologi* yang dikembangkan oleh filsuf Edmund Husserl dan Alfred Schultz, sebagai metode yang berusaha memahami arti peristiwa dan kaitannya terhadap orang-orang dalam situasi tertentu. Menurut Weber disebut sebagai *verstehen*, sebagai pengertian interpretatif

terhadap pemahaman manusia. Fenomenologi tidak berasumsi bahwa peneliti mengetahui arti sesuatu bagi orang-orang yang sedang diteliti (Moleong, 2000). Pengumpulan data, analisis, dan interpretasi dilakukan terhadap fenomena atau peristiwa yang terjadi pada objek yang diteliti. Pendekatan fenomenologi seperti yang dikembangkan oleh Maurice Natanson dalam bukunya *Philosophy of social science: A Reader* (Mulyana, 2002: 59) mengemukakan bahwa pendekatan fenomenologi yang menjelaskan bahwa untuk memahami perilaku seseorang tidak bisa hanya dilihat dari perbuatannya yang tampak, namun harus memperhatikan motif dan nilai yang melatarbelakangi perbuatan tersebut. Pendekatan fenomenologi dimaksudkan untuk mengamati setiap peristiwa yang terjadi pada objek. Penelitian kualitatif ini berbasis pada konsep *going exploring* yang melibatkan *in-depth* and *case-oriented study* atas satu kasus maupun sejumlah kasus (Finlay, 2006).

Penelitian ini juga sesuai dalam mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang baru sedikit diketahui (Straus and Corbin, 2003). Dengan menggunakan desain kualitatif dan pendekatan fenomenologis diharapkan penelitian ini dapat menggambarkan realitas obyek penelitian, selanjutnya memberikan penafsiran dan pemaknaan, disusul dengan mengkaitkan hasil analisa dengan teori yang sudah ada. Ini berarti bahwa metode kualitatif akan memiliki kontribusi terhadap pengembangan teori dan konsep dari obyek yang diteliti.

Populasi dan Sampel

Ketajaman hasil dan analisis sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam menentukan fokus penelitian yang tepat. Penentuan fokus penelitian penting dilakukan dengan pertimbangan utama seperti ditegaskan Patton (1980) yaitu membatasi studi atau membatasi bidang penyelidikan pada penelitian. Oleh karena itu untuk menentukan kriteria-kriteria dalam memasukkan atau mengeluarkan suatu informasi yang diperoleh dilapangan. Artinya, melalui bimbingan dan arahan fokus yang telah ditetapkan peneliti dapat mengetahui dengan persisi data mana yang perlu dikumpulkan dan data mana yang tidak perlu

dimasukakan ke dalam data yang sedang dikumpulkan. Terkait dengan penelitian ini, berdasarkan permasalahan penelitian yang telah dirumuskan, maka fokus penelitian ini adalah:

Aktor-aktor yang terlibat dan memiliki jaringan dalam pengelolaan kebijakan pertambangan, antara lain: Para aktor yang terlibat dalam bisnis tambang, birokrat daerah dan instansi terkait dalam kebijakan pertambangan. Anggota legislatif yang memiliki jaringan dengan pengusaha tambang, dan Aparat keamanan yang memiliki jaringan dengan pengusaha Tambang. Pola keterlibatan aktor dalam bisnis tambang, antara lain: Penerbitan Izin Usaha Pertambangan, Pembiaran terhadap Pertambangan tanpa izin (PETI). Regulasi pengelolaan kebijakan pertambangan dan dampaknya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Ssub fokus adalah: Konflik antara warga lokal dengan perusahaan tambang. Kerusakan lingkungan dan marginalisasi komunitas adat

Menurut Lofland dan Lofland (1984) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data dan informasi dalam suatu penelitian sangat penting, karena data tidak mungkin akan diperoleh tanpa ada sumber data. Sumber data dalam penelitian ini dipilih dengan teknik *purposive sampling*, dimana informan yang dipilih adalah aktor-aktor atau elite politik yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan data yang benar-benar relevan serta kompeten dengan masalah penelitian. Sedangkan informan selanjutnya diminta kepada informan awal untuk menunjukkan orang lain yang sekiranya dapat memberikan informasi serupa dan begitu seterusnya sampai menunjukkan kejenuhan informasi. Dalam kaitan ini, jumlah responden juga bisa mengalami penambahan (*snow-ball*) sesuai kebutuhan sepanjang proses penelitian berlangsung.

Pada dasarnya, sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian akan memanfaatkan seluruh data sepanjang memiliki relevansi dengan substansi dan metodologi yang diinginkan. Adapun jenis-jenis data tersebut dapat dirinci menjadi 3 (tiga) kelompok sebagai berikut:

- a. Data primer, ditempuh melalui wawancara mendalam (*in-depth and semi-structured*) dengan nara sumber kunci (*key person*). Data ini digali dengan menggunakan instrumen berupa pedoman wawancara.
- b. Data sekunder, antara lain berupa dokumentasi mengenai kebijakan pengelolaan pertambangan.
- c. Data tersier, misalnya berupa publikasi berbentuk jurnal, buku-buku, berita koran. Jenis data ini terutama penting untuk memperkuat kerangka konseptual, analisa teoritik, dan *literature review* untuk menopang studi ini.

Sumber data dalam pendekatan penelitian kualitatif adalah semua pihak yang berkepentingandan pelaku utama yang meliputi Bupati Tanah Bumbu, Ketua DPRD Tanah Bumbu, Gubernur Kalimantan Selatan, Ketua DPRD Provinsi, Sekda Kabupaten dan Provinsi, Dinas Pertambangan Kabupaten dan Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dan Provinsi, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten dan Provinsi, Komisi tiga DPRD Provinsi, Aparat keamanan, Preman tambang, mafia/broker tambang dan instansi yang terkait dengan penelitian ini, LSM, Pers, Walhi Banjarmasin dan Pusat, tokoh masyarakat dan msyarakat di sekitar tambang, Jatam (jaringan Tambang) Kementrian dan elite partai politik.

Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian dilakukan secara terus menerus selama pengumpulan data di lapangan hingga pengumpulan selesai dilaksanakan yang mencakup beberapa kegiatan, yaitu; menelaah data, mengelompokkan data, dan menemukan apa yang penting sesuai dengan fokus penelitian serta mempelajari dan memutuskan apa yang akan dilaporkan.

Analisis data selama pengumpulan data dilakukan setiap kali peristiwa yang menjadi fokus penelitian selesai direkam dan dirupakan dalam bentuk laporan lapangan. Analisis datanya telah diusahakan dapat mengungkapkan: (1) data apa yang perlu dicari, (2) hipotesa apa yang harus dites, (3) pertanyaan apa yang harus dijawab, (4) metode apa yang harus dipakai

untuk mencari informasi baru, (5) kesalahan apa yang harus diperbaiki (Nasution, 1988: 130).

Dalam menganalisa data penelitian ini mengacu pada teori yang telah dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992: 21) yang meliputi beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Reduksi data; dalam proses ini data dipilah-pilah dan disederhanakan, sedangkan data yang tidak diperlukan diseleksi agar memberikan kemudahan dalam menampilkan, menyajikan, dan menarik kesimpulan sementara.
- b. Penyajian data; data yang telah dipilah dan disisihkan tersebut menurut kelompok data serta disusun dengan kelompok kategori sejenis untuk ditampilkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan sementara yang diperoleh setelah data direduksi.
- c. Menarik kesimpulan; dalam proses menarik kesimpulan ini diambil dari kategori-kategori data yang telah direduksi dan disajikan untuk menuju pada kesimpulan akhir yang mampu menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Munculnya problem demokratisasi karena masih kuatnya perilaku predator oligarki (*predatory oligarchy*) sebagai warisan Orde Baru yang terdesentralisasi di daerah. Para aktor lokal telah memanfaatkan perubahan institusi kekuasaan untuk tetap bertahan dalam pola patronase. Perilaku *predatory oligarchy* ini setidaknya dapat dijelaskan tiga faktor, antara lain: *Pertama*, para aktor yang menguasai perekonomian saat ini perilaku politiknya (*political behaviour*) relatif sama dengan aktor-aktor era Orde Baru. *Kedua*, pola relasi kuasa antar aktor, baik pada tingkat nasional maupun di tingkat lokal sama-sama berwatak predatoris. *Ketiga*, pola pendekatan yang digunakan para aktor lokal dalam menjalankan kekuasaan menggunakan institusi kekuasaan dan birokrasi melakukan praktik *rent-seeking* (perburuan rente). Perpaduan dari ketiga hal tersebut melahirkan kontinuitas yang berujung berpola *elite capture corruption* di tingkat lokal.

Di era desentralisasi yang ditandai dengan pemilihan kepala daerah (Pemilukada) langsung menjadi arena kontestasi para aktor lokal

membangun patronase dan berinvestasi politik sebagai donatur bagi kandidat Kepala Daerah. Calon kepala daerah yang berhasil terpilih akan memberikan konsesi ekonomi sebagai balas jasa politik melalui pemberian proyek-proyek infrastruktur dan fasilitas ekonomi lainnya yang telah berperan sebagai *political broker* dalam pemilihan kepala daerah (As'ad, 2013).

Kalimantan Selatan sebagai daerah yang kaya sumber daya alam khususnya sektor pertambangan menjadi arena persekongkolan membangun jaringan bisnis politik antara penguasa daerah dengan pengusaha tambang. Para aktor dan kelompok kepentingan saling mempertemukan sumber daya (*exchange resources*). Di tengah *trend* kapitalisme global (*global capitalism*), Kalimantan Selatan menjadi "*the golden boy*" yang menggiurkan bagi para investor. Pemerintah Daerah melalui sejumlah kebijakan atau regulasi telah memberikan kemudahan bagi para investor untuk berinvestasi dalam industri ekstraktif tersebut. Dalam konteks makro, kehadiran para investor dalam industri ekstraktif telah menempatkan daerah ini sebagai arena persekongkolan para aktor (daerah dan pusat).

Pada kasus pertambangan batubara di Kalimantan Selatan, seiring dengan terbukanya pasar batubara yang lebih luas baik pasar domestik maupun pasar luar negeri terus meningkat. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Selatan tahun 2013 produksi batubaranya pada tahun kedua adalah 65.086.681,82 metrik ton. Sebagian besar produksi batubara tersebut dihasilkan oleh perusahaan besar dengan modal asing (PMA) seperti PT Arutmin dan PT Adaro Indonesia. Dengan 29 PKP2B dan 380 kuasa pertambangan (KP) yang mengkapling sekitar 1,8 juta hektare lahan di Kalimantan Selatan (sepertiga luas Kalsel yang mencapai 3,7 juta hektare) telah menjadi sebuah permasalahan serius yang berkepanjangan, terutama menyangkut aspek ingkungan. Kalimantan Selatan sebagai penghasil batubara sebesar 78 juta ton pertahun ternyata 70% batubara itu diekspor ke luar negeri, 29% dikirim ke pulau Jawa dan Bali. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menempatkan sektor pertambangan batubara sebagai andalan utama dalam pembangunan ekonomi daerah yang berlangsung selama ini.

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan, pada tahun 2009, membuat kebijakan untuk mengizinkan dibukanya suatu usaha pertambangan batubara di sejumlah kabupaten, misalnya izin PKP2B PT.Mantimin Coal Mining, walaupun mendapat penolakan dari Pemerintah Daerah setempat, begitu pula dengan adanya izin eksplorasi 6 kuasa pertambangan (KP) di Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru yang juga mendapat penolakan dari warga setempat. Hal ini seolah menjadi bukti bahwa sebenarnya masyarakat menyangsikan bahwa pertambangan batubara yang dikatakan akan mensejahterakan masyarakat sekitar hanya sebuah mitos.

Eksplorasi terhadap pertambangan batubara di Kalimantan Selatan dilakukan oleh beberapa perusahaan besar, menengah, dan skala kecil (koperasi) serta perorangan. Perusahaan pertambangan batubara terdiri dari perusahaan pemegang izin PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) dan perusahaan atau koperasi pemegang izin, kuasa pertambangan (KP), pengelola pelabuhan, para trader, dan eksportir. Eksplorasi pertambangan batubara di Kalimantan Selatan dalam *trend* kapitalis global (investor asing), kapitalis nasional, dan kapitalis lokal memiliki nilai strategis yang menggiurkan untuk menguasai ekonomi pertambangan. Oleh karena itu, bisa dipahami posisi Kalimantan Selatan sebagai penghasil tambang batubara terbesar kedua setelah Kalimantan Timur menjadi arena perebutan aktivitas ekonomi oleh sejumlah perusahaan pertambangan lokal, nasional, maupun investor asing.

Sampai saat ini, walaupun aktivitas pertambangan batubara telah berlangsung selama puluhan tahun ternyata belum memberikan dampak ekonomi secara signifikan bagi rakyat Kalimantan Selatan. Aktivitas ekonomi pertambangan batubara lebih banyak dinikmati oleh para aktor, baik aktor lokal maupun aktor yang berada di pusat di Jakarta yang memiliki jaringan bisnis dengan aktor yang ada di Kalimantan Selatan. Aktivitas pertambangan batubara tidak hanya dilihat dalam perspektif aktivitas ekonomi, akan tetapi juga dalam konteks jaringan bisnis politik.

Bila diamati, aktivitas pertambangan batubara di Kalimantan Selatan menjadi

instrumen membangun jaringan bisnis politik (*business politic network*) dalam *landscape* Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, para aktor ber-lomba-lomba mereposisi diri masuk dalam lingkaran kekuasaan, misalnya menjadi tim sukses atau sponsor dana politik dalam proses Pilkada (As'ad, 2013).

Proses Pilkada yang diwarnai praktik persekongkolan politik dan bisnis, jika dalam penyelenggaraan pemerintahan pasca Pilkada, Kepala Daerah yang terpilih akan lebih memberikan loyalitasnya kepada para klien politik (*political client*) dan klien bisnisnya (*business client*) dari pada (konstituen). Proses Pilkada di era kapitalisasi politik berkaitan erat dengan biaya politik. Pada perkembangan selanjutnya para pemilik modal (pengusaha tambang) akan berperan sebagai pemerintah bayangan (*shadow government*) dalam terminologi White (1996) atau bos lokal (*local bossism*) dalam terminologi Sidel (Sidel, 2013).

Pemerintah bayangan dan bos lokal akan mengendalikan serta mendikte kebijakan pemerintah (bupati atau gubernur), khususnya kebijakan yang terkait dalam pengelolaan pertambangan dan menyandera institusi kekuasaan dan penguasa daerah. Hal ini terjadi karena penguasa daerah yang terpilih dalam proses pemilihan kepala daerah, para pengusaha tambang memiliki andil besar dalam hal dukungan dana (*suppoting financial*) untuk memenangkan sang calon penguasa dalam proses Pilkada. Di tengah kapitalisasi pasar demokrasi, keterlibatan sejumlah pengusaha tambang yang menjadi calon kepala daerah semakin menjadikan pasar demokrasi semakin terbuka dan bernilai mahal di tengah pragmatisme politik rakyat. Pada kasus pilkada di beberapa daerah di Kalimantan Selatan, isu pilkada dan konsesi pertambangan sangat erat hubungannya sebagai bentuk relasi kuasa dan sekaligus menjadi *political marketing* dan strategi untuk memenangkan salah satu kandidat kepala daerah.

Di tengah jaringan bisnis politik, posisi partai politik di Kalimantan Selatan lebih banyak dikendalikan oleh para pengusaha tambang. Logikanya adalah bahwa dengan mengendalikan partai politik sebagai ketua atau memiliki posisi strategis di partai secara otomatis akan memiliki posisi tawar secara

politik dalam proses *landscape* politik, khususnya dalam Pilkada. Para pengusaha tambang batubara telah menjadikan institusi partai politik sebagai strategi membangun relasi kuasa ekonomi dan politik di antara para aktor lokal dan pusat.

Di era pemerintahan Orde Baru, Partai Golkar mendominasi jagat politik di negeri ini. Pada pasca rezim Orde Baru Partai Golkar tidak lagi menjadi kekuatan tunggal atau dominan dalam membangun struktur kekuasaan, akan tetapi telah terfragmentasi melalui berbagai kekuatan Partai Politik dalam membangun struktur kekuasaan politik pada level nasional maupun lokal. Oleh karena itu, pada kasus di Kalimantan Selatan, beberapa pengusaha tambang menguasai posisi-posisi strategis dalam partai. Dengan menguasai partai, maka oligarki lokal akan semakin terstruktur karena telah menjadikan partai sebagai kartel atau lembaga korporasi ketimbang menjadi katalisator politik rakyat.

Oleh karena tidak itu para pengusaha tambang yang bermodal besar dan memiliki sejumlah perusahaan tambang, demikian pula para pensiunan birokrat (bupati dan gubernur) yang memiliki modal besar, berlomba-lomba memperebutkan posisi strategis dalam partai politik atau menjadi ketua dari salah satu partai politik. Dengan menguasai lembaga demokrasi akan memiliki nilai strategis dan *potition bargaining* bagi para kandidat pejabat publik, baik dari segi kekuatan dana maupun dari segi nilai politik.

KESIMPULAN

Pada pasca pilkada, isu tentang kebijakan pertambangan batubara menjadi arena patronase dan transaksional untuk kepentingan ekonomi dan politik. Oleh karena jaringan bisnis tambang hanya akan berputar di sekitar orang-orang yang telah berhasil masuk dalam jaringan kekuasaan dan membentuk *business client* di bawah proteks kekuasaan pejabat publik (bupati atau gubernur) yang terpilih dalam proses pilkada. Para aktor yang bermain dalam arena industri pertambangan adalah orang-orang yang lahir sebagai *business client*, *shadow government*, dan *local bossism* yang dipelihara dan dibesarkan oleh penguasa daerah yang telah memainkan

permainan untuk berkontribusi dalam proses pilkada.

Para aktor ini berusaha membangun relasi kuasa dengan lembaga legislatif dan pemerintah untuk mendapatkan dukungan kebijakan melalui pembuatan sejumlah peraturan daerah (perda) yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan pertambangan. Sebagian orang-orang yang menjadi anggota legislatif adalah orang-orang yang memiliki latar belakang pengusaha tambang. Para anggota legislatif yang berlatar belakang tambang ini memiliki jaringan yang kuat dengan sejumlah perusahaan atau pengusaha tambang. Konspirasi sistematis antara pengusaha tambang dengan anggota legislatif yang berlatar pengusaha tambang dan juga aparat biroksi pemerintah telah menempatkan pengusaha tambang sebagai *local strongmen* dalam bidang ekonomi telah mendikte kebijakan pemerintah. Artinya, kebijakan pertambangan yang selama ini lebih mengakomodir kepentingan elite dari pada masyarakat. Terminologi *local strongmen* diperkenalkan oleh Sidel (2003) sebagai pengatur bayangan dalam kebijakan pemerintah karena memiliki kuasa ekonomi dan mampu membeli kekuasaan politik.

Oligarki ekonomi pertambangan batubara dalam pengelolaan telah dibesarkan oleh proteksi kebijakan penguasa daerah sebagai *business client*. Para *business client* ini adalah para loyalis penguasa daerah (bupati dan gubernur) yang memiliki hubungan kepentingan bisnis dan politik yang sebelumnya ikut bermain dalam arena pilkada. Para pihak yang terlibat dalam arena pilkadapada akhirnya akan tampil sebagai *rent-seekers* dalam pengelolaan pertambangan atau mafia tambang. Pemberian izin usaha pertambangan (IUP) yang akan lebih mudah diberikan bagi para *business client* sebagai bentuk balas budi politik karena berhasil memenangkan pejabat publik tersebut dalam pertarungan politik atau proses pilkada.

REFERENSI

Aspinall dan As'ad. 2013. *Local Election: Mining and Local Bossism in South Kalimantan and Election in South Kalimantan*. ANU. Canberra.

Aspinall, Edward dan Fealy, Greg (Editor). 2003. *Local Power and Politics in Indonesia. Decentralisation end Democratisation.*

Hadiz, Vedi R. 2010. *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*, Stanford University Press, Stanford, California.

Hadiz, Vedi R. 2005. *Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto*: Jakarta. LP3ES.

Harris-White, B. 1996. *A Political Economy of Agricultural Trade in South India: Master of Countryside*. Sage. New Delhi.

Hidayat, S., Susanto, H., Erman, E., Soesilowati, E.S. & Usman, T.S. 2006. *Bisnis dan Politik di Tingkat Lokal: Pengusaha, Penguasa, dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasca Pilkada*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Jakarta. LIPI Press.

Kunio, Yoshihara. 1988. *The Rise of Ersatz Capitalism in Southeast Asia*. Oxford University Press.

MacIntyre, Andrew. 1994. *Organising Interests: Corporatism in Indonesia Politics. Working paper No. 43*. Murdoch University. Australia.

Muhaimin, Yahya. 1991. *Bisnis dan Politik, Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950-1980*. Jakarta. LP3ES.

Robison, Richard. 1985. *Class, Capital and the State in New Order Indonesia*, dalam Higgot, Richard dan R. Robison, *Southeast Asia: Assay in the Political Economy of Structural Change*. London. Routledge and Kegan Paul, Ltd.

Robison, R. 1986., *Indonesia: The Rise of Capital*. Sydney. Allen & Unwin.

Robinson, R. and Hadiz, V. 2004. *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in An Age of Markets*. London. Routledge Curz.

Sidel, John. 2013. *Bossism and Democracy in the Philippine, Thailand, and Indonesia: Towards an alternative framwork for the study of local strongmen*. Palgrave Macmillan.